

Sebab Utama dan Pemicu Faktor Sosial Budaya Konflik Papua Barat

Indah Sopyani¹, Sultan Dhiaulhaq², Prilla Marsingga³

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2110631260005@student.unsika.ac.id¹, 2110631260054@student.unsika.ac.id², prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id³

Abstract: In this article, the author discusses the conflict in West Papua, which has been ongoing for decades and has deep roots in colonialism, oppression, as well as dissatisfaction with the political, economic, and social status in the region. The author employs Johan Galtung's theory of Peace to further understand the main causes and socio-cultural factors influencing the conflict in West Papua. The conflict in Papua is further complicated by the emergence of Armed Criminal Groups (KKB), which are involved in a series of violence, including attacks on security forces, killings, and kidnappings. The author explains two definitions of peace, namely negative peace and positive peace. Negative peace requires government control over ongoing conflicts, while positive peace refers to a peaceful atmosphere characterized by prosperity, justice, and freedom.

Keywords: *Papua conflict, The cause of the conflict in Papua, KKB*

Abstrak: Dalam artikel ini, penulis mengulas tentang konflik di Papua Barat, yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memiliki akar yang dalam pada sejarah kolonialisme, penjajahan, serta ketidakpuasan atas status politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Penulis menggunakan teori Perdamaian menurut Johan Galtung untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sebab utama dan faktor sosial budaya yang memengaruhi konflik di Papua Barat. Konflik di Papua semakin rumit dengan munculnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang terlibat dalam serangkaian kekerasan, termasuk serangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan, dan penculikan. Penulis menjelaskan dua definisi perdamaian yakni perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif memerlukan kontrol pemerintah terhadap konflik yang terjadi, sedangkan perdamaian positif menunjuk pada suasana damai di mana terdapat kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan.

Kata Kunci: Konflik Papua, Sebab konflik di Papua, KKB

PENDAHULUAN

Papua merupakan sebuah provinsi yang terletak di timur Indonesia, Papua telah menjadi pusat perhatian baik secara nasional maupun internasional karena konfliknya yang berlarut-larut selama beberapa dekade. Konflik ini memiliki akar yang dalam pada sejarah kolonialisme, penjajahan, serta ketidakpuasan atas status politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut.

Sejarah konflik di Papua dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda. Papua yang sebelumnya dikenal sebagai Nugini Belanda, merupakan bagian dari Hindia Belanda hingga Perjanjian New York pada tahun 1962 yang isinya menyerahkan administrasi kepada PBB dan akhirnya integrasi dengan Indonesia pada tahun 1963 (Universitas STEKOM, n.d.).

Namun, proses integrasi tersebut tidak sesederhana yang diharapkan, dan konflik internal pun muncul. Sejak saat itu, Papua telah menjadi saksi dari berbagai bentuk perlawanan dan aspirasi kemerdekaan. Gerakan separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), muncul dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Meskipun telah terjadi berbagai upaya perundingan damai dan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik, namun ketegangan tersebut terus berlanjut.

Konflik di Papua semakin rumit dengan munculnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mengategorikan KKB Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris (Finaka, 2022). Mereka terlibat dalam serangkaian kekerasan, termasuk serangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan, dan penculikan, yang telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di antara masyarakat setempat.

Meletusnya peristiwa Trikora pada era Presiden Soekarno membuat masyarakat Papua marah karena secara tidak langsung operasi tersebut melabelkan masyarakat Papua sebagai negara boneka Belanda.

Transparansi demokrasi dan akses informasi terhadap masyarakat di Papua masih sulit dan tertutup. Pemerintah harus memberikan jaminan demokrasi di tanah Papua dan menghindari pendekatan militerisme secara terus menerus. Ruang demokrasi di Papua sendiri masih bisa dibilang rentan terhadap konflik. Sering kali terjadi pemutusan jaringan apabila terdapat penangkapan salah satu aktivis. Hal inilah yang membuat masyarakat di luar Papua tidak mengetahui bagaimana keadaan di Papua.

Pasca labelisasi terorisme oleh Pemerintah Indonesia terhadap KKB di Papua, setiap pimpinan kota selalu dipantau dan diawasi secara terus-menerus. Hal tersebut menyebabkan terbangunnya suatu konstruksi yang mengancam keselamatan masyarakat Papua yang berada di luar Papua. Dampak pelabelan terhadap masyarakat juga dapat dilihat dari laporan tertulis situasi di Papua yang masih dalam kerangka yang tidak objektif. Permasalahan di Papua tidak pernah selesai jika tidak ada ruang demokrasi. Pendekatan yang dilakukan seharusnya tidak hanya mengedepankan infrastruktur fisik, tetapi juga secara kultural termasuk dalam pendidikan. Pelabelan teroris terhadap KKB di Papua tidak akan menyelesaikan masalah di Papua.

Masyarakat di seluruh dunia harus bersatu dan memahami bahwa penindasan masih terjadi. Kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme masih menjadi momok besar yang harus dihadapi kelompok yang tertindas. Hal inilah yang terjadi di Papua dan negara-negara lain di dunia. Eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua jangan sampai menjadi penyulut perlawanan. Untuk menyelesaikan permasalahan di Papua,

diperlukan ruang demokrasi yang dibuka selebar-lebarnya agar memudahkan akses jurnalis dan penyampaian aspirasi masyarakat. Selain itu, pemenuhan dan pengembalian hak-hak masyarakat Papua yang dirampas perlu dilakukan sesegera mungkin.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian kali ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sebab utama dan faktor sosial budaya yang memengaruhi konflik di Papua Barat. Penulis menggunakan teori Perdamaian menurut Johan Galtung. Galtung mengartikan perdamaian dalam dua definisi yakni pertama, perdamaian adalah tidak adanya atau pengurangan kekerasan dalam bentuk apapun. Kedua, perdamaian merupakan tanpa kekerasan dan kreatif mentransformasi konflik. Kedua definisi ini berlaku kerja perdamaian yakni bekerja untuk mengurangi kekerasan dengan cara damai serta studi perdamaian untuk kondisi kerja perdamaian. Definisi pertama berorientasi pada kekerasan dimana perdamaian menjadi negasinya. Sedangkan definisi kedua berorientasi pada konflik dimana perdamaian merupakan konteks konflik yang terungkap tanpa kekerasan dan kreatif. Untuk mengetahui tentang perdamaian kita harus tahu tentang konflik dan bagaimana konflik bisa diubah, baik tanpa kekerasan dan kreatif. Konflik menurut Galtung merupakan perselisihan yang terjadi antara dua orang atau aktor yang mengejar tujuan yang sama atau konflik merupakan dilema seseorang atau actor yang mengejar dua tujuan yang tidak sesuai. Perselisihan tersebut dengan mudah mengarah pada upaya untuk menyakiti atau menyakiti actor atau orang yang menghalangi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka perdamaian dapat didefinisikan sebagai proses menghadirkan damai tanpa melakukan kekerasan langsung maupun tidak langsung. Proses menghadirkan damai

menunjuk pada tindakan kreatif individu agar dapat mentransformasi konflik atau perselisihan yakni dengan cara mengetahui konflik, bagaimana konflik dapat diatasi, diubah secara kreatif tanpa menggunakan kekerasan. Dengan demikian perdamaian berarti tidak adanya kekerasan dalam segala bentuk maupun konflik yang berlangsung dengan cara yang konstruktif. Perdamaian ada di dalam interaksi masyarakat tanpa kekerasan serta dapat mengelola konflik mereka secara positif.

Galtung membagi perdamaian dalam dua tipologi yakni perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif diartikan sebagai tidak adanya kekerasan atau tidak adanya perang.

Perdamaian negatif memerlukan kontrol pemerintah terhadap konflik yang terjadi yakni dengan melakukan pengamanan dan perlindungan oleh aparat keamanan di wilayah-wilayah perbatasan konflik. Strategi yang dipakai untuk menghadirkan damai negatif adalah dengan memisahkan pihak yang berkonflik, sehingga pihak-pihak yang berkonflik tidak saling bertemu satu dengan yang lain. Dengan menghadirkan damai negatif maka pihak yang sedang berkonflik tidak akan saling bertemu dan tidak akan tercipta ruang bersama untuk menghasilkan perdamaian yang diinginkan. Integrasi yang diinginkan semua pihak tidak terwujud oleh karena pemisahan yang dilakukan pemerintah dengan menempatkan perlindungan sekuritas.

Gagasan perdamaian sebagai tidak adanya kekerasan kolektif terorganisir antara kelompok manusia khususnya negaranegara, antar kelas, antar ras, dan kelompok etnis merujuk pada jenis perdamaian negatif. Perdamaian positif menunjuk pada suasana damai di mana terdapat kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan. Damai positif menganjurkan interaksi mendalam warga masyarakat demi menghadirkan integrasi sosial. Menghadirkan perdamaian positif diperlukan kerja sama dengan tujuan

memperbaiki masa lalu dan membangun kembali masa depan. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi serta menjadi tanggung jawab bersama.

Menurut Galtung Perdamaian positif menghadirkan hal-hal baik dalam masyarakat, khususnya kerja sama dan integrasi antara kelompok yang ada dalam masyarakat. Klasifikasi perdamaian positif adalah integrasi struktural, optimis, preventif, perdamaian dengan cara damai. Perdamaian positif menunjuk pada kondisi sosial di mana kegiatan mengeksploitasi dapat diminimalkan atau dihilangkan dan dimana tak ada kekerasan dalam bentuk apa pun. Kehadiran damai positif untuk memberikan situasi yang merangkul, adil, serta menjaga harmoni ekosistem. Oleh karena itu, terkait dengan perdamaian positif, ada sepuluh nilai-nilai hubungan positif yakni kehadiran kerjasama, kebebasan dari rasa takut, bebas dari keinginan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tidak adanya eksploitasi, kesetaraan, keadilan, kebebasan bertindak, pluralisme, dinamisme. Dalam pemaknaannya, individu yang satu tidak mengeksploitasi satu sama lain, tentang individu yang tidak hidup dalam ketakutan dan kecemasan, tentang individu yang memiliki berbagai tindakan terbuka untuk diri mereka sendiri sehingga mereka dapat hidup. Perdamaian positif diisi dengan konten positif seperti pemulihan hubungan, penciptaan sistem sosial yang melayani kebutuhan seluruh penduduk dan resolusi konstruktif konflik.

Damai yang positif dimaknai dalam pemahaman Galtung mengenai rekonsiliasi. Menurut Galtung, rekonsiliasi adalah bentuk akomodasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik destruktif untuk saling menghargai satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit, dendam, takut, benci, dan bahaya terhadap pihak lawan. Dari pengertian ini

maka dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi merupakan bentuk akomodasi dari pihak yang bertikai untuk saling menghargai dan tidak saling membenci terhadap pihak lawan.[5]

Pemahaman ini menyatakan bahwa rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik merupakan tahapan perdamaian yang akan memakan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebab rekonsiliasi merupakan proses mengejar suatu perdamaian dengan menyelesaikan akar permasalahan dan mengampuni, serta dapat memperoleh kondisi yang rukun (kembali rukun). Mengacu pada makna perdamaian yakni proses menghadirkan damai tanpa kekerasan langsung maupun tidak langsung maka ada dua tipe yang dikemukakan yakni perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif yakni situasi di mana tidak ada perang oleh karena intervensi pemerintah melalui pengamanan dan perlindungan aparat keamanan. Sedangkan perdamaian positif merupakan situasi tidak adanya kekerasan baik kekerasan langsung maupun tidak langsung. Perdamaian positif dapat terwujud dalam kerja sama antara masyarakat agar dapat menghadirkan integrasi sosial yakni pemulihan hubungan dalam masyarakat. Perdamaian positif berorientasi pada masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian perdamaian positif dapat dipertahankan oleh karena kerja sama setiap anggota masyarakat untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan dengan cara “mendeskripsikan obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif” (Anggito & Setiawan 2018:10). Penulisan ini pula berisikan kutipan-kutipan yang bersifat fakta dari berbagai sumber dan terbukti kebenarannya. Sebagaimana seseorang membaca dan mengkaji sebuah

tulisan sehingga terciptalah sebuah tulisan baru. Dengan cara membaca buku dan jurnal terkait, artikel ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Materi – materi yang digunakan dalam penelitian sangat beragam, termasuk di dalam teks yang memuat permasalahan dan sekumpulan data. Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan agar terciptalah satu garis lurus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik di Papua Barat

Sejarah munculnya konflik di Papua terkait erat dengan sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada Sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945, terjadi perdebatan yang panjang mengenai status Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Soekarno dan Moh. Yamin berargumen bahwa Papua seharusnya menjadi bagian dari Republik Indonesia karena dalam konteks sejarah, Papua merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Namun, Moh. Hatta mempertanyakan hal ini dengan mengacu pada pandangan etnografis, menyatakan bahwa bangsa Papua termasuk dalam kelompok Melanesia, berbeda dengan mayoritas wilayah Indonesia yang didominasi oleh bangsa Polinesia. Oleh karena itu, menurut Hatta, keputusan mengenai status Papua sebaiknya diserahkan kepada penduduk Papua sendiri (Mukhtadi, 2021).

Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi Papua tetap berada di bawah administrasi Belanda. Belanda kemudian memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka mendukung misi dekolonisasi dengan tujuan mempersiapkan Papua untuk kemerdekaannya di bawah naungan Belanda. Kaum elit Papua membentuk Nieuw Guinea Raad pada April 1951 untuk mengatur penentuan nasib sendiri,

yang menghasilkan persiapan pembentukan negara Papua Barat. Pada 1 Desember 1961, bendera Papua Barat, Bintang Kejora, dikibarkan bersama dengan bendera Belanda, dan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dinyanyikan di hadapan pemerintah Belanda. Merespon hal itu presiden Soekarno mulai melancarkan operasi pembebasan Irian Barat (Mukhtadi, 2021).

Papua adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang kembali bergabung dengan Republik Indonesia melalui Perjanjian New York, yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Kesepakatan ini diakui oleh Majelis Umum PBB pada 21 September 1962. Pada 1 Oktober 1962, pemerintahan Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan sementara yang diawasi oleh PBB, sebelum akhirnya pada 1 Mei 1963 wilayah tersebut diserahkan kembali kepada Indonesia.

Setelah operasi Trikora dan Perjanjian New York, muncul bibit separatisme yang kemudian berkembang menjadi KKB di Papua. Masyarakat pro kemerdekaan Papua menegaskan bahwa Indonesia merebut kemerdekaan Papua melalui kebijakan Trikora dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang dianggap tidak sah oleh mereka yang mendukung kemerdekaan. Mereka menilai bahwa PEPERA tidak sah karena tidak seluruh suara warga Papua diakomodasi. PEPERA sendiri disepakati dalam Perjanjian New York, dimana pendapat rakyat diadakan pada bulan Juli–Agustus 1969. Hasilnya kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB pada 19 November 1969, yang menjadi dasar hukum bagi integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Setelah PEPERA, masyarakat Papua yang mendukung kemerdekaan dari Indonesia menunjukkan keyakinan mereka bahwa mereka telah lama dijajah sejak kedatangan kekuatan asing di Papua Barat. Keyakinan ini semakin kuat seiring waktu karena semakin banyaknya

pemahaman akan identitas bangsa Papua yang unik dan berbeda secara signifikan dari bangsa-bangsa lain yang terasosiasi dengan Indonesia. Dengan demikian, mereka yang ingin kemerdekaan menciptakan identitas bangsa yang menegaskan bahwa mereka bukanlah bagian dari Indonesia (Effendi & Panjaitan, 2021).

Kecemburuan sosial, kurangnya pembangunan yang memadai, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat langsung bagi wilayah Papua, serta dominasi pendatang yang merendahkan penduduk asli sebagai kelas kedua, semuanya menjadi pendorong bagi pertumbuhan dukungan dan simpati terhadap OPM, bahkan dari mereka yang sebelumnya menolaknya. Penduduk asli Papua merasa bahwa pemerintah Indonesia tidak adil dalam pembangunan kesejahteraan dan ekonomi Papua. Ketidakkampuan negara untuk mengimbangi kebijakan politik dengan kepentingan masyarakat Papua mendorong pembentukan OPM sebagai upaya untuk menuntut kesetaraan, kemerdekaan, dan hak asasi manusia di Papua. Bagi OPM, perjuangan mereka dianggap sebagai upaya untuk keadilan, namun oleh pemerintah, tindakan mereka dianggap sebagai gerakan separatis karena ingin memisahkan diri dari Indonesia melalui tindakan pidana. Pemerintah kemudian memberikan label "KKB" kepada kelompok ini (Effendi & Panjaitan, 2021).

KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror baik kepada warga sipil hingga TNI dan Polri. Peristiwa ini membuat warga Papua menjadi trauma. Terbentuknya KKB Papua tidak serta merta terjadi begitu saja, adanya konflik yang kompleks menjadi salah satu penyebab terbentuknya. Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri

pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI.

Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk Otonomi Khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elite saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan.

Dengan aksi kejahatannya tersebut, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM lantas diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Sekarang pun, KKB masih menyebarkan teror dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir. Tujuan utama dari KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis, yang dapat mengancam keutuhan negara.

Faktor Sosial Budaya

Melihat dari faktor sosial budaya yang dijelaskan oleh Michael E. Brown. Brown mengemukakan teorinya yang menegaskan bahwa kompleksitas konflik internal tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu faktor atau variabel. Untuk itu Brown membedakan *the underlying causes of conflict* dari *the proximate causes of conflict*. Secara lebih spesifik Brown memberikan penekanan pada pengaruh kebijakan atau perilaku elit pemimpin sebagai pemicu terjadinya ledakan konflik di suatu daerah. Brown tidak membantah bahwa faktor-faktor struktural, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perceptual menjadikan suatu daerah rentan terhadap konflik tetapi kita tidak boleh mengabaikan peran dari elit pemimpin yang memicu terjadinya

konflik. Faktor sosial budaya yang menyebabkan munculnya KKB dapat kami kelompokkan menjadi 2 kelompok, dimana untuk kasus KKB ini kami menyimpulkan masuk ke dalam teori Underlying Causes, yang akan dijelaskan dibawah ini.

a) Pola Diskriminasi

Masyarakat Papua menjadi korban rasisme dan diskriminasi di negaranya sendiri. Pola diskriminasi sendiri bisa melalui tayangan televisi atau pun film dan buku sekolah yang merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran anak. Wening Udasmoro, ahli bahasa dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, mengungkapkan bahwa anak adalah peniru ulung. Melalui pengalaman kesehariannya, mereka mengamati dan meniru hal-hal yang ditonton dan dibaca. Keseharian anak yang dekat dengan media populer berpengaruh dalam membentuk kesadaran, tingkah laku, dan karakter mereka.

Dari beberapa film tentang Papua yang tayang di televisi, saya menemukan masih cukup banyak film anak bertema Papua yang mengandung unsur diskriminatif dan rasis. Misalnya film Denias, Senandung di Atas Awan, yang merupakan salah satu contoh film anak yang bercerita tentang anak Papua. Film tersebut masih saja menggambarkan citra anak-anak Papua yang primitif, terbelakang, miskin, dan cenderung suka berkelahi. Gambaran yang penuh stereotip juga akan mudah kita temui dalam beberapa film anak bertema Papua.

Stereotip senada juga ditemukan dalam serial drama remaja *Diam-Diam Suka* di salah satu televisi swasta. Serial tersebut menggambarkan bahwa orang Papua itu bodoh, aneh, dan primitif. Tayangan lain yang sejenis bisa kita jumpai dalam tayangan komedi Keluarga Minus. Dalam tayangan tersebut kita akan mengingat sosok Minus yang lucu dan terkadang berlaku konyol. Tayangan tersebut memberikan sesuatu hal yang relatif baru, yakni kemunculan wajah

Papua dalam televisi. Tetapi kemunculan tersebut cenderung memposisikan Papua sebagai bahan olok-olok dan layak ditertawakan. Padahal secara tidak sadar hal tersebut akan melanggengkan stigma terhadap orang Papua, yakni stigma bodoh dan konyol.

Imajinasi Papua yang primitif, bodoh, miskin, dan hal-hal negatif lainnya sudah terinstitusionalisasi dalam film, tayangan televisi dan buku sekolah. Sikap rasis dan diskriminatif tersebut didorong oleh sikap superior pembuat dan pencipta teks media yang dilegitimasi oleh negara. Legitimasi tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam memahami keinginan masyarakat Papua. Negara sering kali absen dalam memperhatikan banyak aspek kehidupan orang Papua, baik soal pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan hal-hal penting lainnya.

Negara seharusnya perlu memperhatikan representasi Papua yang adil dan humanis dalam bacaan maupun tontonan untuk anak. Representasi dalam bacaan maupun tontonan tentang Papua yang kerap kali muncul dalam buku, televisi, dan film bukan sesuatu hal remeh dan hanya dipandang sebatas hiburan. Kualitas bacaan dan tontonan tersebut mempunyai implikasi pada masa depan imajinasi anak-anak Indonesia.

Jika ingin memutus mata rantai diskriminasi dan rasis maka sejak dini negara harus memperhatikan kualitas bacaan dan tontonan anak-anak. Anak adalah masa depan peradaban kita. Konstruksi hari ini membentuk perilaku masa depan. Anak adalah peniru dari lingkungannya. Apa yang dilihat, baca dan tonton sangat mungkin mempengaruhi sikapnya.

Sementara itu, diskriminasi rasial yang terjadi di kalangan orang Papua juga terus meningkat. Selain peristiwa Surabaya dan Jawa Timur yang terjadi pada 2019, stigma negatif dan diskriminasi terhadap orang Papua masih sering terjadi, baik di kalangan masyarakat biasa, pelajar/mahasiswa, guru/dosen hingga kepada pejabat/elit

politik yang memiliki ras asli Papua (Melanesia). Berbagai lontaran kata-kata rasis sudah sering disampaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, berbagai bentuk diskriminasi secara umum seperti ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, hak ekonomi yang dirampas, serta kesenjangan sosial yang tinggi hingga pelecehan terhadap budaya asli orang Papua masih sering terjadi.

Marginalisasi dan diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua. Hal ini perlu dihentikan dan dilakukan pembangunan yang berorientasi pada orang asli Papua, termasuk hutan Papua, karena selama kurun waktu 50 tahun ini mereka tersingkirkan. Diskriminasi rasial terhadap warga asli Papua dinilai masih merupakan persoalan dasar yang menjadi sumber konflik di Bumi Cendrawasih itu. Konflik di Papua dinilai juga tidak akan pernah selesai jika terus menerus menggunakan paradigma yang mendikotomikan: NKRI dan separatist.

b) Sejarah Kelompok yang Bermasalah

Sejarah Papua yang dianggap manipulatif pada saat Perpera pada tahun 1967. Hal ini perlu dianalisis dengan dilandasi rasa saling percaya sebagai bagian dari upaya berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan. Pepera, atau Penentuan Pendapat Rakyat, telah menjadi isu sentral bagi Papua sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Diberlakukannya Pepera pada tahun 1969 dipicu oleh konflik mengenai status Papua Barat yang akan dikuasai oleh Indonesia atau Belanda. Pepera merupakan bagian dari Perjanjian New York yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1962, yang bertujuan untuk mentransfer kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda kepada Indonesia.

Dalam Perjanjian New York, disepakati bahwa referendum harus diadakan dengan mekanisme satu orang satu suara atau one man one vote, yang berarti setiap penduduk Papua memiliki hak suara untuk menentukan pilihannya. Namun, mekanisme Pepera ini dipermasalahkan oleh beberapa pihak.

Menurut tokoh Papua, Socrates Sofyan Yoman, Pepera tidak sesuai dengan kehendak Perjanjian New York karena tidak menerapkan mekanisme one man one vote. Pada saat itu, populasi total Papua sekitar 800 ribu jiwa, namun hanya 1.025 orang yang terlibat dalam musyawarah untuk menentukan masa depan Papua, apakah akan merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia.

Aktivis Papua sepakat bahwa berdasarkan Pepera, Papua tidak merdeka sebagai negara independen, tetapi bergabung dengan Indonesia. Namun, terdapat paksaan dan intimidasi sebelum dan selama pelaksanaan Pepera. Oleh karena itu, hasil Pepera yang menyatakan mayoritas setuju untuk bergabung dengan Indonesia oleh 1.025 orang yang ikut musyawarah dipandang kontroversial, karena dipengaruhi oleh situasi yang terjadi pada waktu itu.

Eksplorasi Sumber Daya Alam di Papua

Eksplorasi sumber daya alam di Papua menggambarkan bagaimana kekayaan alam wilayah tersebut telah menjadi sumber konflik akibat ketidaksetaraan ekonomi yang mendalam. Papua dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang emas, gas alam, dan perkebunan kelapa sawit. Namun, ironisnya, kekayaan ini belum membawa kemakmuran bagi sebagian besar penduduk asli Papua.

Perusahaan-perusahaan multinasional seringkali mendominasi sektor ekonomi Papua, dengan mengendalikan dan menguasai eksploitasi sumber daya alam. Mereka memperoleh izin eksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa banyak memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Meskipun Papua menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah pusat Indonesia melalui pajak dan royalti, penduduk asli Papua jarang merasakan dampak positifnya secara langsung. Alih-alih, mereka sering ditinggalkan dalam

kemiskinan dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, kekayaan alam Papua dieksploitasi secara besar-besaran, menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengancam mata pencaharian tradisional masyarakat adat Papua, seperti berburu, berladang, dan bertani.

Tidak adanya redistribusi kekayaan yang adil dan transparan meningkatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua. Mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di tanah mereka. Ketidakadilan ekonomi ini menjadi pemicu utama konflik di Papua, karena masyarakat Papua merasa terpinggirkan dan diabaikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial wilayah mereka.

KESIMPULAN

Konflik berkepanjangan di Papua juga merupakan dampak dari terbatasnya akses jurnalis untuk memperoleh dan menyebarkan informasi kepada khalayak umum. Hal ini menjadi permasalahan yang penting untuk ditangani karena ruang demokrasi bagi masyarakat Papua dapat terbuka salah satunya diawali dengan pemberian akses terhadap jurnalis. Dukungan untuk pemberian ruang demokrasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih banyak mengadakan diskusi-diskusi untuk mengkaji permasalahan yang sedang dihadapi seperti halnya masalah di Papua. Salah satu pendekatan dengan mekanisme internasional yang dapat dilakukan adalah memperlakukan Provinsi Papua setara dengan provinsi yang lain dalam hal akses kepada wartawan asing. Kemudian dengan cara membebaskan tahanan politik Papua dan membuka ruang-ruang demokrasi. Ketika ruang demokrasi terbuka, informasi terkait situasi dan kondisi di Papua akan

tersebar dan mudah diperoleh. Akan tetapi jika ruang demokrasi tidak diberikan, konflik dan perlawanan akan terus terjadi. KKB di Papua dan TNI sama-sama bertindak atas dasar kepentingan ekonomi, militer, dan politik. Adanya akumulasi modal dan eksploitasi besar-besaran serta pembukaan perusahaan beriringan dengan terjadinya perlawanan sehingga menyebabkan konflik di Papua. Hal itu sah dilakukan selama tidak menembak masyarakat sipil biasa tanpa alasan yang logis. Diharapkan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencabut labelisasi terorisme bagi kelompok masyarakat Papua sebagai bentuk itikad baik pemerintah untuk mengurangi diskriminasi kepada kelompok masyarakat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, T., & Panjaitan, A. C. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). *Rechtidee*, 223-245.
- Elisabeth, A. (2017, November 22). *Memahami akar masalah Papua dan penyelesaiannya: jangan gegabah*. Diambil kembali dari The Conversation: <https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785>
- Finaka, A. W. (2022). *Pemerintah tetapkan KKB Papua Jadi Kelompok teroris*. Diambil kembali dari Indonesia baik: <https://indonesiabaik.id/videografi/pemerintah-tetapkan-kkb-papua-jadi-kelompok-teroris>
- humasdprp. (2019, November 6). *Keterwakilan OAP di DPRD se-*

Papua Sangat Minim. Diambil kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua: <https://dpr-papua.go.id/keterwakilan-oap-di-dprd-se-papua-sangat-minim/>

Mukhtadi. (2021). Strategi Pemerintah dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 85-94.

Universitas STEKOM. (t.thn.). *Konflik Papua*. Diambil kembali dari Ensiklopedia Dunia: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konflik_Papua

<https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/>.

Pusat Penelitian Politik LIPI (2011), “Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua Penyelesaian Hanya dengan Dialog, Tak Bisa dengan Intervensi Kekerasan”, <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-papua/547-riset-lipi-empat-akar-masalah-konflik-papua-penyelesaian-hanya-dengan-dialog-tak-bisa-dengan-intervensi-kekerasan-.html>.

Heralt, O. (n.d.). A critical analysis of Positive and Negative Peace. <https://doi.org/978-955-4563-71-1>

Temesgen Tilahun, “Johan Galtung’s Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: an Appraisal,” *International Journal of Political Sciences and Development*. Vol 3 No 6, ISSN: 2360-784X (2015): 251.

References DIJKEMA, C. (2007, May). Negative versus Positive Peace - Irénées. [Www.irenees.net](http://www.irenees.net).

Johan Galtung and the Quest to Define the Concept of Peace. (2020, December 14). *Vision of Humanity*.

Jubi.co.id, 21 Oktober 2019, “Korban dalam Keberagaman: Kentalnya Rasisme dan Diskriminasi Terhadap Orang Papua”, <https://jubi.co.id/korban-dalam-keberagaman-kentalnya-rasisme-dan-diskriminasi-terhadap-orang-papua/>

Amnesty International Indonesia, 8 Juni 2020, “Papua: 5 Masalah HAM yang Harus Diselesaikan”,